

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN

**SYAHRUL
A011181303**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN

Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SYAHRUL
A011181303**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN

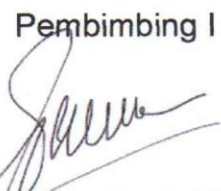
disusun dan diajukan oleh

SYAHRUL
A011181303

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 05 Juli 2022

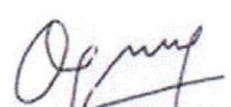
Pembimbing I



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
NIP. 19660717 199103 2 001

ACC UJIAN SKRIPSI
05/07/2022

Pembimbing II



Muhammad Agung Ady Mangilep, SE., M.Si.
NIP. 19740315 2000312 1 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI

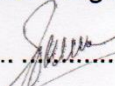
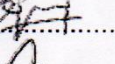
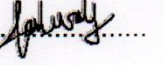
ANALISIS PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

SYAHRUL
A011181303

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal **22 Juli 2022** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Ketua	1..... 
2.	M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syahrul
NIM : A011181303
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

"Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan"

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Syahrul

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudillah, rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya.

Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Kesenjangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta saran-saran dari berbagai pihak.

Penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada orang tua penulis: Bapak Making dan Ibu Hamsina, sosok orang tua yang kebajikannya tak mampu diukur dengan apapun. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan tak terhingga, serta do'a yang tak henti dipanjatkan kepada penulis. Walaupun tidak pernah merasakan pendidikan formal tetapi tetap teguh dan paham akan arti pentingnya pendidikan untuk anak anaknya. Rasa terimakasih juga kepada keluarga besar, adik tercinta, Bapak H. Hasaning, Ibu Hj. Nursia, Bapak Akhmad Solong serta yang lainnya atas dukungan baik itu dalam bentuk material maupun nonmaterial.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuannya, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,

- M.Si., CWM®. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si. selaku penasehat akademik yang selalu memberi nasehat dan arahan kepada penulis saat berproses di bangku perkuliahan.
 5. Ibu Prof. Dr. Nursini, SE., M.Si. selaku Pembimbing I beserta Bapak Muhammad Agung Ady Mangilep, SE., M.Si. selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi
 6. Bapak Dr. Madris, SE., DPS., M.Si. CWM®. dan Ibu Dr. Fatmawati, M.Si., CWM®. selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi
 7. Bapak Ir. H. Abdurrahman, M.M. selaku pimpinan Rumah Tahfidz Abudrrahman tempat kami banyak belajar dan berproses selama di Makassar dan tentunya seluruh pengurus serta pimpinan Rumah Tahfidz Abdurrahman. Terimakasih telah mewujudkan mimpi terindah yakni menghafalkan Al-Quran sambil kuliah.
 8. Kepada seluruh Mahasantri Rumah Tahfidz Abdurrahman (Ryan, Ahmad, Aksan, Masdar). Terima kasih atas segala do'a, dukungan, perhatian, dan bantuan yang tak terhitung selama masa perkuliahan, berkat kalian masa perkuliahan ini menjadi lebih berwarna dan bermakna. Terima kasih selalu mengingatkan penulis dalam kebaikan
 9. Seluruh sahabat seperjuangan. Saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah senantiasa bersabar dalam mendengarkan segala keluh kesah penulis dan atas segala dukungan

dan bantuan yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar UKM LDM Darul Ilmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan UKM LDK MPM Universitas Hasanuddin. Terimakasih sudah mempercayakan penulis menjadi bagian dari organisasi luar biasa ini. Terima kasih banyak atas segala proses pembelajaran dan pengalaman luar biasa untuk penulis.
11. Kepada seluruh sahabat, dosen, pegawai, keluarga yang telah memberikan bantuanya yang belum sempat penulis sebutkan.

Terakhir, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mengharap kritik dan saran yang membangun karena penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, maka sepenuhnya berasal dari penulis.

Makassar, Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI SELATAN

Syahrul
Nursini
Muhammad Agung Ady Mangilep

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2011-2020. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data-data tersebut ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross section* dalam bentuk tahunan. Penelitian ini menggunakan data 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode Teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan *Fixed Effect*. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender yaitu Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial, variabel Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu memaksimalkan pembangunan ekonomi dengan mengutamakan kesetaraan gender, memperkuat kebijakan dan mendukung kontribusi perempuan dalam sektor formal, dan memperbaiki kualitas, kuantitas, dan potensi perempuan agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci:

Pertumbuhan Ekonomi, Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

ABSTRACT

ANALYSIS OF GENDER EQUALITY EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN SOUTH SULAWESI

Syahrul
Nursini
Muhammad Agung Adi Mangilep

This study aims to analyze the influence of gender equality on the economic growth in districts/cities of South Sulawesi Province during the period year 2011-2020. this research is type of Quantitative research using secondary data obtained from this research is type of Quantitative research (BPS) of South Sulawesi Province and the the ministry of Women empowerment and Child protection. These data are tabulated in panel data structure, which is combination between data in the form of *time series* and *cross-section* annually. This study used data from 24 districts/cities in South Sulawesi Province to analyze with *Analytical panel data regression technique method* with Fixed effect approach. Empirical results prove that whole variable used to measure the level of gender equality is Gender Development Index, Gender Empowerment Index and Women's labor force participation simultaneously Affects significantly to Economy growth in South Sulawesi Province. partially, variable Gender Development Index, Gender Empowerment Index and Women's labor force participation have influenced positively to growth economy with level significant influence. That is why, the regencies/cities government in South Sulawesi Province are expected to be capable in maximizing economic development by prioritizing gender equality, strengthening policy and supporting the contribution of the woman in the formal sector, and improving quality, quantity, and potency women to be able to compete in the power market as an effort to increase economic growth

Keywords: *Economic growth, South Sulawesi, Gender Development Index, Gender Empowerment index, Women's labor force participation level*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	ixx
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xivv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2. Konsep Gender	15
2.1.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	19
2.1.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	22
2.1.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	24

2.2.	Hubungan Antar Variabel.....	27
2.2.1.	Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	27
2.2.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	29
2.2.3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	30
2.2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	32
2.3.	Studi Empiris	33
2.4.	Kerangka Konseptual	37
2.5.	Hipotesis.....	38
BAB III		39
METODE PENELITIAN.....		39
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2.	Jenis dan Sumber Data	39
3.3.	Metode Pengumpulan Data	39
3.4.	Metode Analisis Data.....	40
3.5.	Uji Asumsi Klasik	44
3.6.	Uji Hipotesis.....	46
3.7.	Definisi Operasional Variabel.....	48
BAB IV		50
PEMBAHASAN.....		50
4.1.	Perkembangan Variabel Penelitian	50
4.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	50
4.1.2.	Indeks Pembangunan Gender.....	53
4.1.3.	Indeks Pemberdayaan Gender	60
4.1.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.....	66
4.2.	Pemilihan Model Data Panel.....	68
4.2.1.	Uji Chow.....	69
4.2.2.	Uji Hausman.....	69
4.3.	Uji Asumsi Klasik	70

4.3.1. Uji Normalitas	71
4.3.2. Uji Multikolinearitas	71
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas	72
4.3.4. Uji Autokorelasi	73
4.4.1. Uji t.....	73
4.4.2. Uji F.....	75
4.5. Pembahasan	75
4.5.1. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	75
4.5.2. Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	77
4.5.3. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	79
BAB V	77
PENUTUP	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Ketimpangan Gender.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	51
Gambar 4.2 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	54
Gambar 4.3 Angka Harapan Hidup Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	56
Gambar 4.4 Harapan Lama Sekolah Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	57
Gambar 4.5 Rata Rata Lama Sekolah Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	58
Gambar 4.6 Pengeluaran Perkapita Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	59
Gambar 4.7 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	61
Gambar 4.8 Perempuan di Parlemen Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	63
Gambar 4.9 Perempuan Tenaga Profesional Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	64
Gambar 4.10 Sumbangsi Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	65
Gambar 4.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2011-2020.....	2
Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020.....	5
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow.....	69
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman.....	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	71
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	72
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	73
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	73
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Statistik.....	84
Lampiran 2 Tabulasi Data Panel.....	87
Lampiran 3 Biodata Penulis.....	94

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat diukur dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Peningkatan tersebut terjadi jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya. Kenaikan output perkapita dalam jangka panjang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Boediono, 2013).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi baik dari segi jumlah dan kualitas. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Sukirno (2006) bahwa, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Peningkatan faktor-faktor produksi tersebut dipengaruhi oleh modal fisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Adanya peningkatan faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah secara tidak langsung menggambarkan kemakmuran di wilayah tersebut (Tarigan, 2007).

Beberapa wilayah di Indonesia fokus dalam peningkatan faktor-faktor produksi selama beberapa tahun terakhir. Termasuk Sulawesi Selatan yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik sejak beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Povinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia
Tahun 2011-2020 (Persen)

Tahun	Sulawesi Selatan	Indonesia
2011	8.13	6.16
2012	8.87	6.16
2013	7.62	5.74
2014	7.54	5.21
2015	7.19	4.88
2016	7.42	5.03
2017	7.21	5.07
2018	7.04	5.17
2019	6.91	5.02
2020	-0.71	-2.07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

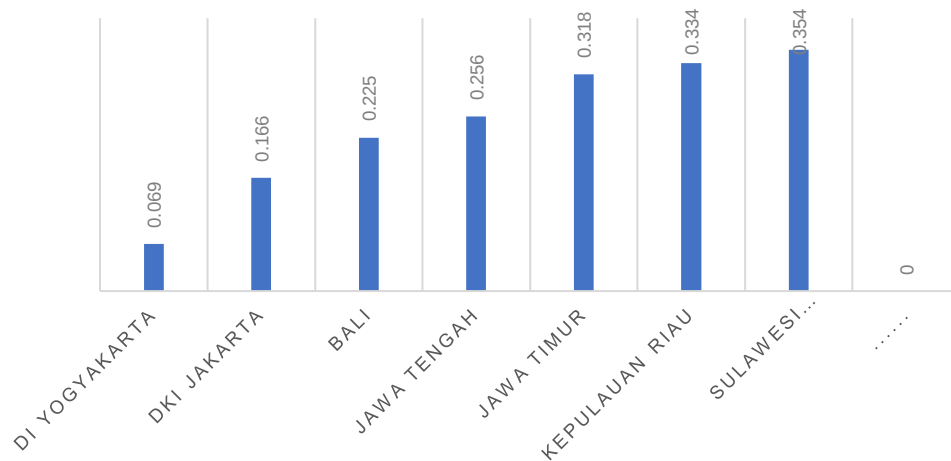
Pada **Tabel 1.1** menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 sampai tahun 2020. Selama sepuluh tahun, pertumbuhan ekonomi Nasional maupun Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi namun tidak signifikan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dari pandemi covid-19. Termasuk Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sebesar -0.71% dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2.07%.

Yang menarik dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan adalah walaupun dalam keadaan kontraksi pada tahun 2020, laju pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07% poin. PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar Rp. 328.19 Triliun. Angka ini berhasil mencatatkan PDRB Perkapita sebesar Rp. 56,51 Juta. Walaupun penurunan pendapatan perkapita Sulawesi Selatan sebesar -0,82 persen, ini masih lebih baik dibandingkan penurunan angka Nasional yang mencatatkan angka -3,72 persen.

Sulawesi Selatan mencatatkan capaian pertumbuhan ekonomi yang mengesankan selama beberapa tahun terakhir, tentu ini merupakan sebuah kabar yang baik. Namun ketika melihat salah satu indikator keberhasilan pembangunan yakni kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan belum menunjukkan efektivitas yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan efektif jika diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* menyatakan bahwa, salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara adil baik antar generasi, antar etnis, antar jenis kelamin, maupun antar wilayah. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal peluang maupun hasil merupakan dimensi mendasar dari sebuah pembangunan manusia, hal ini yang masih belum tercipta secara maksimal di Sulawesi Selatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.1 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi di Indonesia 2020

Kesetaraan gender belum tercipta di Sulawesi Selatan, dibuktikan dengan angka Indeks Ketimpangan Gender Sulawesi Selatan pada **Gambar 1.1** yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Tercatat pada tahun 2020 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)/*Gender Inequality Indeks* (GII) Sulawesi Selatan sebesar 0.354 persen. Walaupun mengalami perbaikan sebesar 0.048 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IKG Sulawesi Selatan masih menempati posisi ketujuh IKG terendah di Indonesia setelah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau.

Padahal jika melihat laju pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih lebih unggul selama sepuluh tahun terakhir dibandingkan dengan enam provinsi yang memiliki angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terbaik (DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau). Fenomena ini menjadi sebuah

permasalahan karena dengan adanya perbaikan pada perekonomian harusnya mampu menciptakan kesetaraan gender pada suatu wilayah. Dengan kata lain bahwa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya mampu mengatasi ketimpangan gender (Samsul Arifin, 2018). Hal ini tidak tercipta di Sulawesi Selatan dan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan belum berkualitas karena belum menciptakan kesetaraan gender.

Permasalahan gender juga terlihat pada kondisi penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Laki-laki masih mendominasi pasar tenaga kerja di Sulawesi Selatan selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini terlihat jelas pada kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2020.

Tabel 1.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi Selatan
Tahun 2011-2020

Tahun	TPAK	TPAK Laki Laki	TPAK Perempuan
2011	64.32	84.86	45.60
2012	62.82	81.76	45.56
2013	60.49	80.47	42.27
2014	62.04	80.23	45.33
2015	60.94	79.01	44.31
2016	62.92	79.69	47.47
2017	60.98	79.66	43.76
2018	63.02	80.15	47.19
2019	62.90	80.41	46.71
2020	63.40	79.66	48.16

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada **Tabel 1.2** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 63,40 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,50 persen poin. Yang menjadi fenomena di Sulawesi Selatan adalah TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Fenomena tersebut juga terlihat pada tahun 2020, dimana TPAK laki-laki mencapai 79,66 persen sedangkan TPAK perempuan hanya 48,16 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 79 orang, sedangkan dari 100 penduduk usia kerja perempuan, sekitar 48 orang yang termasuk angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sangat rendah dibandingkan laki laki dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini kembali menunjukkan bahwa kesetaraan gender belum tercapai di Sulawesi Selatan.

Tidak tercapainya kesetaraan gender di Sulawesi Selatan juga memberikan gambaran kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan. Hal ini terbukti pada tidak maksimalnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sudah tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 7,2%-7,6% dan hanya tercapai sebesar 6.91%. Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 7,4%-7,8% dan pada tahun ini pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0.71%. Ini membuktikan bahwa pemanfaatan sumber daya

manusia di Sulawesi Selatan harus di maksimalkan lagi sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya penggunaan sumber daya manusia yang lengkap dan lebih baik maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Esteve-Volart, 2004).

Kesetaraan gender menjadi topik penting yang perlu untuk diperhatikan. Laki laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama terutama dalam hubungannya dengan kondisi sosial dan ekonomi. Kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam kondisi ketika tidak terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan atau hak dan kehidupan sosial laki-laki dan perempuan sama, seimbang dan harmonis (Diana, 2018).

Kesetaraan gender merupakan sebuah indikator penting, karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari sebuah pembangunan manusia. Kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam penghargaan, dan kesamaan hak dalam partisipasi dan representasi harus tercipta pada seluruh indikator pembangunan. Untuk itu setelah *Millennium Development Goals* (MDGs) dinyatakan berakhir pada tahun 2015, kesetaraan gender menjadi salah satu fokus utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rancangan pembangunan global yang disepakati berbagai negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dilandasi hak asasi manusia dan tanpa deskriminasi baik itu pembangunan dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan

hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bersifat universal, terintegrasi dan komprehensif untuk menyatakan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau *No-one Left Behind*.

Sustainable Development Goals (SDGs) menyepakati 17 tujuan global yang kemudian dibagi menjadi 169 target dalam rangka melanjutkan upaya pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 (*Localisdgs* Indonesia, 2022). Tujuan ke lima dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Kesetaraan gender dapat diukur melalui dua indikator yakni melalui Indeks Pembangunan Gender/IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender/IDG. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan. IPG diukur dari kualitas dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, kesehatan menggunakan umur harapan hidup, dan ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Selanjutnya, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu presentasi sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi (Kementrian PPPA, 2020).

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan kontribusi dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor semakin membaik terutama pada sektor ketenagakerjaan. Peningkatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan selama sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan kesetaraan gender yang tercipta menunjukkan tercapainya pembangunan ekonomi yang berkualitas. Selain itu, hal ini tentunya dapat mewujudkan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang topik kesetaraan gender dengan menghubungkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?
2. Apakah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan gambaran tentang pengaruh

indikator pemberdayaan gender terhadap kondisi tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

2. Pengembangan Ilmu

Digunakan sebagai bahan pelengkap dan bahan tambahan untuk penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

3. Pemerintah

Digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan masukan dalam membuat kebijakan dan program-program pemerintah kedepannya sehubungan dengan pemberdayaan gender dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Secara sederhana pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana terjadinya peningkatan output atau peningkatan pendapatan nasional agregat dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan terjadi jika pendapatan riil yang dihasilkan dari faktor-faktor produksi lebih besar daripada tahun sebelumnya. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran kuantitatif yang dapat menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Dalam Prasetyo (2009), mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas produksi barang maupun jasa secara fisik dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan tersebut adalah dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. PDB dapat dipandang dalam dua hal, pertama PDB sebagai total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian, kedua PDB adalah total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi (Mankiw, 2007).

Dengan menggunakan metode standar, penghitungan Produk Domestik Bruto dapat diukur dengan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran (Tambunan, 2009).

Adapun beberapa cara untuk menghitung pendapatan nasional yaitu:

1. Pendekatan Pengeluaran,

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling penting karena dapat menunjukkan kegiatan ekonomi yang dicapai. Metode ini bisa memberikan gambaran tentang baik buruknya kondisi perekonomian. Cara menghitung PDB dengan menggunakan metode ini adalah dengan menjumlahkan nilai pengeluaran dari berbagai golongan masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Barang-barang yang diimpor tidak dihitung sebagai pendapatan, demikian juga barang-barang yang masih akan diproses ulang atau barang setengah jadi tidak dihitung untuk menghindari terjadinya *double counting*.

Adapun komponen-komponen penghitungan pendapatan dengan metode pengeluaran ini adalah menggunakan variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor neto. Apabila kita rumuskan pendekatan pengeluaran sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + X - M$$

C = Konsumsi masyarakat

I = Investasi masyarakat

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

2. Pendekatan Nilai Tambah (*Add Value*)

Pendekatan ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode ini adalah menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Cara ini mempunyai dua tujuan penting yaitu untuk mengetahui besarnya sumbangan dari berbagai sektor ekonomi dan menjadi metode yang digunakan untuk menghindari penghitungan dua kali yaitu dengan hanya menghitung produk netto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

3. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini menghitung semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, kapital, teknologi dan keahlian baik berupa gaji, upah, sewa, bunga dan keuntungan yang diterima selama satu tahun. Salah satu negara yang menggunakan metode penghitungan pendapatan ini adalah

Amerika Serikat. Apabila kita rumuskan pendekatan pendapatan sebagai berikut:

$$Y = Y_i + Y_r + Y_w + Y_{cpr} + Y_{cpd}$$

Y_i = Pendapatan dari bunga investasi

Y_r = Pendapatan sewa atau rent atas lahan

Y_w = Pendapatan upah atas tenaga kerja

Y_{cpr} = Pendapatan atas laba ditahan (*Corporate Profits Retained*)

Y_{cpd} = Pendapatan atas laba dibagi (*Corporate Profits Distributed*)

Pertumbuhan ekonomi terjadi jika suatu wilayah mampu meningkatkan jumlah produksi yang menghasilkan peningkatan output. Untuk mengukur hal tersebut dapat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto memberikan gambaran kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa dari output yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi (Sukirno, 2006).

2.1.2. Konsep Gender

Gender tidak menggambarkan perbedaan jenis kelamin secara biologis. Gender menggambarkan kesamaan peran, pekerjaan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan antara laki laki dan perempuan. Gender merujuk pada peran, perilaku, kegiatan, atribut dan peluang yang dianggap sesuai oleh masyarakat untuk perempuan dan laki-laki. Gender merupakan istilah populer di masyarakat yang dapat memberikan gambaran terkait

perilaku, peran, sikap, sifat, dan atribut yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Bappenas, 2019).

Ketimpangan gender sudah menjadi topik utama dalam masalah pembangunan di berbagai negara, baik itu di negara maju maupaun di negara berkembang. Gender dapat diartikan sebagai ketidaksamaan peran, kedudukan dan sifat pada laki-laki dan perempuan secara sosial maupun kultural. Gender dapat menjadi faktor sosial dalam menganalisis adanya perbedaan anatar laki-laki dan perempuan baik dalam peran, tanggung jawab, kesempatan, dan hambatan (Hasples dan Suriyansarn, 2005).

Ketimpangan gender terjadi dalam bentuk stereotype, marjinalisasi, subordinasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan sikap, perlakuan, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menjadi sesuatu yang terus menerus terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena budaya pemikiran yang selalu menganggap bahwa laki-laki memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Gender menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdiri dari 17 tujuan global dan gender secara khusus dibahas pada tujuan kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Walaupun masuk pada tujuan khusus dalam SDGs, gender juga menjadi fokus pada semua tujuan SDGs

sesuai dengan adanya lebih dari 100 target yang membahas tentang kesetaraan dan pemberdayaan gender.

Kesetaraan gender menjadi salah satu fokus dalam pembangunan berkelanjutan karena dapat menguatkan pentingnya kesetaraan dalam pembangunan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa target yang dapat menjadi dasar keberhasilan dalam kesetaraan gender (*United Nation*, 2020). Yaitu:

1. Tidak ada diskriminasi pada perempuan dan anak perempuan dimanapun.
2. Melarang keras kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan baik di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan perilaku berbahaya, seperti penjualan anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita.
4. Menghargai pekerjaan yang tidak dibayar seperti rumah tangga melalui fasilitas pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial serta peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin penuh partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.

6. Menjamin akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi i seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan pembaharuan untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

Untuk mengevaluasi pemberdayaan gender dalam pembangunan, *United Nation Development Programme* (UNDP) sepakat menggunakan dua perhitungan yaitu menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan. IPG dapat diukur menggunakan harapan lama sekolah

dan rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan. Selanjutnya, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu presentasi sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

2.1.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan kesetaraan gender. Badan Pusat Statistik (2020), mengartikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Indeks (HDI)*.

UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 1995, setelah lima tahun sebelumnya UNDP telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya menghitung disparitas dari masing masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Artinya pada metode ini hanya menghitung masing-masing dari indeks komposit yang digunakan sehingga IPG dengan metode ini tidak bisa

diinterpretasikan terpisah dari IPM. Jika nilai IPG sama dengan nilai IPM, maka tidak terjadi kesenjangan gender. Tetapi bila nilai IPG lebih rendah dari nilai IPM maka terjadi kesenjangan gender. UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009.

Pada tahun 2014 UNDP memperkenalkan metode baru dalam menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG). Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG dengan menggunakan metode baru merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia (Kementrian PPPA, 2014).

Metode perhitungan dengan menggunakan metode yang baru masih menggunakan dimensi yang sama dengan perhitungan metode sebelumnya yakni menggunakan umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indonesia mengukur umur panjang dan hidup sehat menggunakan angka harapan hidup, pengetahuan menggunakan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak menggunakan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Untuk menyusun indeks dari masing-masing indikator yang digunakan maka dapat menggunakan rumus:

$$Indeks X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-min)})}{(X_{(i-maks)} - X_{(i-min)})}$$

Dimana:

$X_{(i,j)}$ = Indeks Komponen ke i

$X_{(i-min)}$ = Nilai Minimum Komponen

$X_{(i-maks)}$ = Nilai Maksimum Komponen

Ketika semua komponen sudah memiliki indeks maka terkhusus untuk komponen pendidikan, dihitung lagi dengan menggunakan rata-rata aritmatik yaitu:

$$X_{pendidikan} = \frac{X_{p1} + X_{p2}}{2}$$

Untuk menghitung agregasi dalam menentukan angka IPM laki-laki dan perempuan, menggunakan metode yang sama ketika menghitung IPM secara keseluruhan. Yaitu:

$$IPM_{laki-laki} = \sqrt[3]{X_{kesehatan L} \times X_{pendidikan L} \times X_{ekonomi L}}$$

$$IPM_{perempuan} = \sqrt[3]{X_{kesehatan P} \times X_{pendidikan P} \times X_{ekonomi P}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik digunakan cenderung lebih sensitive menggambarkan ketimpangan dibandingkan dengan rata-rata aritmatik yang cenderung dapat menutupi ketimpangan (Kementrian PPPA, 2014).

Dengan menggunakan metode yang baru maka perhitungna IPG yang digunakan tidak membandingkan angka IPG dan IPM namun menggunakan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Angka yang dihasilkan menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki dengan menggunakan angka 100 sebagai standar baku. Jika angka IPG mendekati 100 maka pembangunan gender semakin merata. Namun sebaliknya, jika angka IPG menjauhi 100, maka pembangunan gender semakin timpang. Angka IPG di Indonesia dengan menggunakan metode yang baru dimulai pada tahun 2010.

2.1.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam pembangunan, pemberdayaan gender dapat diukur menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)/*Gender Empowerment Measure* (GEM). IDG dihitung melalui rata-rata dari tiga indeks yaitu peran aktif perempuan dalam politik, peran aktif perempuan dalam menjadi tenaga profesional dan sumbangsi pendapatan perempuan. IDG menunjukkan sejauh mana perempuan diberdayakan melalui partisipasi di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi (KPPPA, 2020).

United Nations of Development Programme (UNDP) memberikan gambaran terkait pemberdayaan perempuan dibagi dalam tiga fokus utama yaitu:

1. Partisipasi politik yang dihitung dari jumlah persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di kursi parlemen.

2. Partisipasi ekonomi yang dihitung dengan dua indikator, yang pertama, jumlah persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai legislator, pejabat senior dan manajer. Kedua, jumlah persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional dan teknis.
3. Penguasaan sumber daya ekonomi yang dihitung dari pendapatan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan.

Dalam perhitungan IDG lebih dahulu dihitung EDEP (*Equally Distributed Equivalent Percentage*) yaitu indeks yang digunakan untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen adalah nilai EDEP nya dibagi 50, karena 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

$$IDG = \frac{1}{3} [(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})]$$

Dimana:

IDG = Indeks Pemberdayaan Gender

I_{par} = Keterwakilan Perempuan di Parlemen

I_{DM} = Indeks Pengambilan Keputusan

$I_{inc-dis}$ = Sumbangan Pendapatan Perempuan

Dalam menghitung komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) maka cara yang digunakan dari ketiga komponen sama. Sebagai contoh

dalam menghitung keterlibatan perempuan di parlemen maka dapat menggunakan rumus:

$$I_{(par)} = EDED(par)/50$$

$$EDED_{(par)} = (Pf Xf^{(1-\varepsilon)} + Pm Xm^{(1-\varepsilon)})^{1/(1-\varepsilon)}$$

Dimana:

Xf = Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Xm = Keterwakilan Laki-Laki di Parlemen

Pf = Proporsi Populasi Perempuan

Pm = Proporsi Populasi Laki-Laki

ε = Parameter Penolakan Ketimpangan (=2)

Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia dilakukan bersamaan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dimulai pada tahun 1996 yang dihitung secara berkala setiap tiga tahun sekali. Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mulai dihitung rutin setiap tahun sejak 2004 sampai sekarang.

2.1.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor produksi. Salah satu faktor produksi tersebut adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang dalam mencari pekerjaan dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah, mengurus rumah tangga dan menerima pendapatan lain. Batas umur minimum

tenaga kerja yaitu 15 tahun tanpa ada batas umur maksimum (Simanjuntak, 2001).

Konsep ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk usia 15 tahun keatas tanpa batasan usia atau sesuai kesepakatan setiap negara.

Badan Pusat Statistik membagi klasifikasi tenaga kerja menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang masuk dalam usia produktif 15-64 tahun yang mempunyai pekerjaan, sedang tidak bekerja atau sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. Tenaga kerja dalam perekonomian memiliki peranan yang sangat besar. Tenaga kerja menghasilkan produksi berupa barang atau jasa dari sumber daya yang diolah sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Barang atau jasa yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperoleh upah atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan.

Keterlibatan penduduk pada berbagai kegiatan ekonomi dapat diukur dengan melihat partisipasi penduduk yang masuk dalam pasar tenaga kerja. Partisipasi penduduk dalam pasar tenaga kerja dapat diukur menggunakan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau *Labor Force Participation Rate* (LFPR) sebagai penduduk usia kerja suatu negara yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik itu bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPAK menggambarkan proporsi tenaga kerja yang tersedia untuk aktif dalam produksi barang dan jasa.

Rusli, (1995) menyatakan bahwa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 orang penduduk usia kerja. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maka semakin tinggi jumlah tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk berkontribusi dalam perekonomian. TPAK dapat dihitung menggunakan presentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas}} \times 100\%$$

Simanjuntak, (2001) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu, penduduk yang masih berstatus pelajar dan yang mengurus rumah tangga, jenis kelamin, tingkat umur, tingkat upah, dan pendidikan. Jika jumlah penduduk yang bersekolah lebih besar maka tingkat partisipasi angkatan kerjanya menjadi lebih kecil. Begitupun dengan penduduk yang mengurus rumah tangga, semakin banyak yang mengurus rumah tangga maka tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga akan menjadi lebih kecil. Selain beberapa faktor di

atas, Sumarsono, (2003) menambahkan satu faktor lainnya yaitu tingkat penghasilan keluarga. Jika penghasilan keluarga lebih besar, maka anggota keluarga memiliki kecenderungan untuk bekerja menjadi rendah, dan akan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan agama. Namun pada pelaksanaannya, upaya tersebut masih mengabaikan permasalahan ketimpangan gender yang menyebabkan adanya kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan penerima hasil pembangunan.

Gender menjadi salah satu faktor penentu kemajuan pembangunan yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender dalam berbagai dimensi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi (Khayria dan Feki, 2015).

Tingginya angka ketimpangan gender dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam *World Bank* (2012), menyatakan bahwa tingginya biaya disparitas gender bukan hanya dapat

mengurangi kesejahteraan perempuan, namun berpengaruh terhadap kesejahteraan laki-laki dan anak serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam Klassen dan Lemanna (2009) yang menguji dampak ketimpangan gender di pendidikan dan pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi menemukan bahwa ketimpangan gender dapat merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah. Ketimpangan gender mengakibatkan produktivitas modal manusia (human capital) akan rendah sehingga pertumbuhan ekonomi juga rendah. Efek ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kim, Lee dan Shin (2016) bahwa, jika ketidaksetaraan gender sepenuhnya dihapus maka tingkat pertumbuhan tahunan pendapatan perkapita dan pendapatan agregat dapat ditingkatkan. Juga menemukan bahwa kebijakan kesetaraan gender yang menurunkan biaya penitipan anak atau meningkatkan waktu pria untuk produksi rumah dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan output agregat.

Teori yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006), menambahkan bahwa kaum wanita memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan sumberdaya (lahan garapan, modal, dan lain-lain), maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status wanita dalam baik dalam

pendidikan maupun kesehatan memiliki dampak penting dalam memutuskan lingkaran kemiskinan. Terputusnya lingkaran kemiskinan maka akan berdampak pada perbaikan ekonomi.

Galor dan Weil (1996) menyatakan bahwa kesetaraan gender cenderung meningkatkan kesehatan dan pendidikan perempuan. peningkatan peranan perempuan dalam persediaan modal manusia secara positif mempengaruhi pemberdayaan politik dan ekonomi penduduk perempuan. Akibatnya, negara-negara dapat menggunakan sumberdaya manusia mereka dengan lebih efisien. Teori ini kemudian dibuktikan oleh Esteve-Volart (2004) bahwa penggunaan sumber daya manusia yang lengkap dan lebih baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Indeks Pembangunan Gender (IPG) memberikan gambaran sejauh mana kualitas pembangunan manusia dengan mengutamakan kesetaraan gender. Peran perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi alat ukur dalam menentukan tingkat pembangunan gender dalam suatu wilayah. Dengan menggunakan metode yang disepakati oleh *United Nation Development Programme* (UNDP), angka 100 dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kemajuan pembangunan gender apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Semakin mendekati angka 100 menunjukkan

pembangunan gender mengalami peningkatan, sebaliknya jika mengalami penurunan maka pembangunan gender mengalami penurunan.

Peningkatan pembangunan gender memberikan dampak positif terhadap pembangunan. Peningkatan pembangunan gender menurunkan angka ketimpangan gender baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Suryadi (2001) menyatakan bahwa, dengan meningkatkan taraf pendidikan dan menghilangkan ketimpangan gender dalam pendidikan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Todaro dan Smith (2006), mengemukakan bahwa angkatan kerja terdidik merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu kesehatan yang baik dan pemenuhan gizi yang sempurna mempengaruhi kesempatan kerja, produktivitas dan upah. Sehingga dengan adanya perbaikan pada tiga komponen utama IPG, pembangunan gender dapat tercapai dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) disusun dengan melihat sejauh mana pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan atau manajerial. Sumbangsi pendapatan perempuan menggambarkan keterlibatan perempuan dalam perekonomian terutama pada

pasar tenaga kerja. Sumbangsi pendapatan perempuan yang semakin meningkat menggambarkan kualitas pekerja perempuan yang semakin diperhitungkan dalam dunia kerja (BPS, 2020).

Keterwakilan perempuan di parlemen menggambarkan sejauh mana perempuan terlibat dalam bidang politik. Peran perempuan dalam politik dapat memberikan hak dan suara perempuan dalam penyusunan kebijakan yang akan berdampak pada kesempatan perempuan untuk ikut berpartisipasi di ruang publik. Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi langkah solutif untuk mendorong kesejahteraan perempuan dengan adanya kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kesetaraan gender.

Galor dan Weil (2000) menyatakan bahwa kesetaraan gender cenderung meningkatkan kesehatan dan pendidikan perempuan. Peningkatan peranan perempuan dalam persediaan modal manusia secara positif mempengaruhi pemberdayaan politik dan ekonomi penduduk perempuan. Sehingga perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam peningkatan partisipasi angkatan kerja. Partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kondisi *outcomes* perempuan, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan (Chattopadhyay & Duflo, 2004)

Perempuan sebagai tenaga profesional menggambarkan tingkat partisipasi perempuan yang bekerja di sektor formal. Perempuan yang bekerja di sektor formal menjadi salah satu aspek yang penting dalam ukuran kualitas

pemberdayaan perempuan. Partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi dan pengambilan keputusan mampu memperkuat kondisi perekonomian, meningkatkan capaian pembangunan nasional dan memperbaiki kualitas hidup tidak hanya bagi perempuan, namun juga bagi laki-laki, keluarga dan komunitas (Yoyo Karyono, Ema Tusianti, Alvina Clarissa, 2019).

2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang sangat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi. Arsyad (2010) menyatakan bahwa dengan adanya perpaduan antara tenaga kerja dan modal dalam produksi maka akan menghasilkan sejumlah output yang lebih efektif dan efisien. Tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi suatu ukuran dalam melihat perkembangan tenaga kerja karena TPAK menunjukkan presentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK juga menjadi standar dalam melihat sejauh mana produktivitas penduduk yang sudah memasuki usia kerja. TPAK yang rendah menunjukkan rendahnya kesempatan berkerja pada penduduk usia kerja, begitupun sebaliknya TPAK yang tinggi menunjukkan tingginya kesempatan kerja bagi masyarakat yang sudah berada pada usia kerja. Semakin banyak penduduk usia kerja yang bekerja maka akan menghasilkan peningkatan output baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan

bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output yang dihasilkan dari suatu kegiatan perekonomian, karena semakin banyak masyarakat yang produktif akan semakin meningkatkan output yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB.

2.3. Studi Empiris

Harchand Ram, Moradhvaj, Swastika Chakravorty, Srinivas Goli (2022) melakukan penelitian dengan judul *Does Gender Inequality Affect Economic Development? An Evidence Based On. Analysis of Cross-National Panel Data of 158 Countries*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara ketidaksetaraan gender terhadap hasil pertumbuhan dalam bentuk produk domestik bruto (PDB) per kapita di 158 negara di dunia selama tahun 2000-2015. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa GII memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan PDB per kapita.

Jinyoung Kim, Jong-Wha Lee, dan Kwanho Shin (2016) melakukan penelitian dengan judul *A Model of Gender Inequity and Economic Growth*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ketidaksetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada penentuan alokasi waktu perempuan antara produksi pasar, produksi rumah tangga, pengasuhan anak, dan pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro ekonomi Asia dan menganalisis menggunakan regresi data panel untuk menyelidiki

bagaimana berbagai aspek ketidaksetaraan gender terkait dengan kinerja pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Anna Minasyana, Juliane Zenker, Stephan Klasen, Sebastian Vollmer (2019), melakukan penelitian dengan judul *Educational Gender Gaps and Economic Growth: A Systematic Review and Meta-Regression Analysis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesenjangan gender dalam pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif regresi data panel untuk menjelaskan hubungan antara ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan pertumbuhan ekonomi per kapita. Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif antara kesetaraan gender pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Ata Can Bertay, Ljubica Dordevic, dan Can Sever (2020), meneliti tentang *Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry-Level Data*. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis apakah kesetaraan gender yang lebih tinggi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian ini juga menguji apakah negara yang mempekerjakan lebih banyak wanita tumbuh relatif lebih cepat atau tidak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender mempengaruhi hasil ekonomi riil.

Winda Novtaviana (2020), meneliti tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan regresi linear yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2014-2018.

Indah Rahayu (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pada variabel Rata-Rata Lama Sekolah perempuan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel Angka Harapan Hidup laki-laki dan variabel Angka Harapan Hidup (perempuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi).

Aktaria dan Handoko (2012), menganalisis tentang ketimpangan gender di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan *Gender Inequality Index* (GII). metode yang digunakan adalah statistika deskriptif dalam menganalisis ketimpangan gender dan statistika inferensia untuk menjelaskan pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan ketimpangan gender yang tajam di setiap kabupaten/kota. Hasil analisis regresi menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan antara ketimpangan gender dengan pertumbuhan ekonomi.

Sutri Vilinda dan Lia Yuliana (2019) meneliti tentang Penerapan Regresi Data Panel Pengaruh Kesenjangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan gender serta untuk mengetahui dampak kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau selama periode 2011-2015 menggunakan analisis deskriptif dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesetaraan gender di bidang teknologi dan angkatan kerja mengalami peningkatan sedangkan kondisi kesetaraan gender di bidang pendidikan mengalami penurunan. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa rasio akses internet, rasio jam kerja, dan rasio upah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

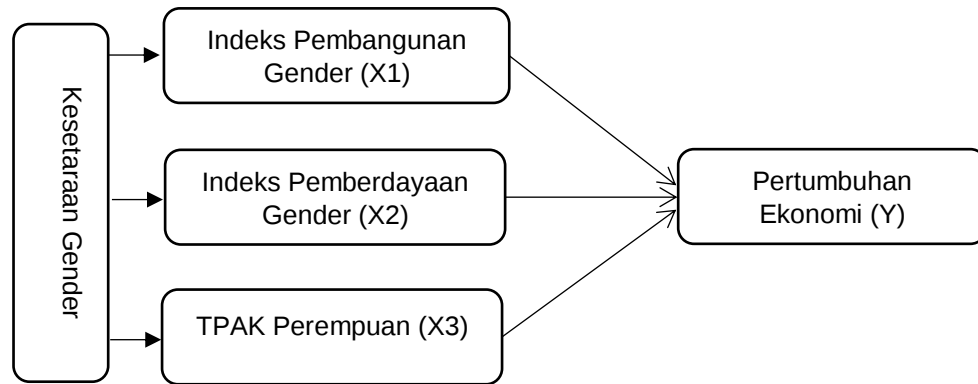
2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dirancang dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan kembali beberapa hal yang dijadikan peneliti sebagai landasan berfikir untuk ke depan. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kesetaraan gender merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kesetaraan gender yang tercipta menunjukkan adanya peningkatan pada kontribusi perempuan dalam berbagai bidang yakni pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, manajerial serta ketenagakerjaan. Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kesetaraan gender dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG), dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi akibat dari adanya perbaikan dalam pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Perbaikan tersebut dapat menjadi investasi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat memaksimalkan kontribusi seluruh sumberdaya manusia khususnya

perempuan dalam pasar tenaga kerja formal maupun informal. Partisipasi aktif perempuan dalam pasar tenaga kerja tersebut dapat meningkatkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang kondisi kesetaraan gender di Sulawesi Selatan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2020.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang terdiri dari data *time series* 2011-2020 yang digabungkan dengan data *cross section* 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan penelitian bersifat kuantitatif, yaitu data dipaparkan dalam bentuk angka. Adapun sumber data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode untuk memperoleh data dan informasi melalui penelusuran buku literatur dengan bahan kuliah dan beberapa terbitan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian,